



“Sains” Memasak Akuntansi: Pemikiran Udayana dan Tri Hita Karana

Ari Kamayanti

Universitas Brawijaya

arikamavanti@ub.ac.id

doi: 10.18382/jraam.v1i2.16

Informasi Artikel

Tanggal masuk	19-06-2015
Tanggal revisi	16-08-2015
Tanggal diterima	26-09-2015

Keywords:

Ontology

Udayana

THK

Accounting Research Method

Abstract

This article aims to raise awareness that accounting research needs ought to be based upon beliefs about what is "true" or what is "the truth" itself. Research methods should be understood not only as the technique of "cooking". By exploring, the thought of King Udayana and Tri Hita Karana (THK) through genealogy reveals epistemological positions, which is in the positive as well as critical accounting research has a different "truth". In positivism, the thought of King Udayana and THK can become mechanistic elements of reality that need to be tested. In the critical paradigm, they function as liberators of oppression towards a desirable reality ontology.

Kata kunci:

Ontologi

Udayana

THK

Metode Riset Akuntansi

Abstrak

Artikel ini bertujuan memberikan penyadaran bahwa pelaksanaan riset akuntansi perlu dilandasi keyakinan mendasar atau “keimanan” tentang berbagai aspek realita. Metode riset harus dipahami sebagai bukan semata teknik “memasak”. Telaah tentang pemikiran Raja Udayana dan Tri Hita Karana (THK) melalui genealogi mendedahkan posisi epistemologis, yang dalam riset akuntansi positif maupun kritis memiliki “kebenaran” masing-masing. Dalam paradigma positivisme, pemikiran Raja Udayana dan THK dapat menjadi salah satu elemen mekanistik realita yang perlu diuji. Di sisi lain, dalam paradigma kritis, mereka berfungsi sebagai pembebas keterkungkungan menuju realita yang diidamkan.

1. Pendahuluan

Apa yang terlintas dalam pikiran saat mendengar kata “memasak”? Dalam akuntansi, “memasak” angka bisa diidentikkan dengan aktivitas *creative accounting*. Itupun memiliki tujuan mengurangi pajak (Shah dan Butt, 2011), mendapatkan pinjaman bank (Popa, 2012), dan secara khusus berkenaan dengan kepentingan tertentu yang mengarah pada tindakan manipulasi yang tidak etis (Jackling, et al., 2007). Pemahaman ini sebenarnya mengarahkan kita pada suatu kesadaran bahwa aktivitas memasak dapat direkatkan dengan etika. Memasak bisa menjadi sesuatu yang baik atau bahkan buruk.

Jika konsep “memasak” di atas adalah suatu metafora, mari saya¹ perhatikan apa arti memasak yang sebenarnya (*literal*) untuk menjelaskan hubungan konsep riset akuntansi, masakan, dan etika. Bagi saya yang seorang ibu, memasak adalah kegiatan harian. Setiap pagi saat mas Iyut tukang sayur keliling datang dan meneriakkan dengan lantang “Sayuuur..”,

¹ Dalam paradigma *positivisme* yang menekankan pada objektivitas, penggunaan kata “saya” menjadi sesuatu yang dianggap “tabu”. Artikel ini masuk dalam paradigma *non-positivisme*.

semerta keluar para ibu-ibu untuk berbelanja.

"Ada apa *aja* Mas?", Tanya bu Sinta, tangannya sibuk menggeledah kotak sayuran.

"Ada otak sapi.. Ibu mau?" Mas Iyut menyodorkan sebuah tas plastik berisi yang dimaksud.

"Wah ya kolesterol nanti suami saya... yang lain apa?"

"Udang..?" kata Mas Iyut selagi memperlihatkan barang dagangannya.

"Anak saya *nggak* suka udang, kalau ayam kampung ada ya?"

"Ada, tapi lagi mahal Bu, Rp40.000 per ekor."

"*Nggak* apa-apa deh... yang penting sehat. *Kalo* dimasak kecap semua suka."

Cuplikan dialog tersebut menunjukkan bahwa memasak bukan hanya sebuah teknik mempersiapkan masakan agar dapat disantap, namun lebih dari itu, ia adalah sebuah proses yang melibatkan cinta. Cinta ini mewujudkan dalam tindakan menjauhkan suami dari kolesterol (tidak memilih otak sapi), menyiapkan apa yang disukai anak (bukan udang), dan terlebih lagi menyajikan sesuatu yang menyehatkan (ayam kampung) melalui kreativitas (dimasak kecap). Memasak tidak dimulai dengan bagaimana cara memotong, membumbui, atau menggoreng. Jauh sebelum itu, proses memasak dimulai dengan menentukan "apa" yang dimasak dan secara esensial memenuhi tujuan memasak. Oleh karena itu, wajar jika seorang ibu yang penuh cinta harus pusing setiap hari "hanya" untuk menentukan "masak apa hari ini?"

Jadi kalau anda berpikir bahwa memasak dimulai dari bagaimana cara memasak, anda sudah memotong rantai proses memasak itu sendiri. Jika hal ini dilakukan, maka sudah terjadi pengabaian ontologi² masakan, yang mana di dalamnya terdapat nilai (cinta) yang mendasari proses memasak apa keberadaan/tujuan masakan. Maukah anda membuang cinta dalam hidup anda? Saya yakin anda akan menjawab "tidak."

Sayangnya, terdapat kecenderungan para periset akuntansi memotong rantai masakan ini. Sebagian besar dari mereka melakukan riset akuntansi seperti memasak tanpa cinta melalui peletakan metode riset

sebagai semata alat mendapatkan pengetahuan³. Periset akuntansi cenderung sangat terpaku pada bagaimana cara melakukan pengukuran hasil riset (Icerman & Welch, 1989), triangulasi yang baik (Modell, 2005), kemudahan dikerjakan atau bahkan alasan pragmatis sebagaimana yang disampaikan De Loo dan Lowe (2011:23) bahwa "...*methods are chosen based on pragmatic and/or political considerations.*" Lebih menyedihkan lagi jika metode riset tertentu dipilih hanya karena terlihat *fashionable* atau *keren* (De Loo & Lowe, 2011).

Jadi, memang metode penelitian adalah suatu akhir dari ujung rantai keyakinan dasar atas realita dan ilmu (ontologi) yang mengarahkan peneliti dalam memperoleh kebenaran (epistemologi). Hal yang kemudian menjadi perdebatan adalah apa sebenarnya "kebenaran" itu sendiri. Perlu disadari kembali bahwa kebenaran hanya akan benar-benar "benar" apabila ia sesuai dengan keyakinan kita. Seandainya ada yang mengatakan pada anda bahwa besok matahari akan terbit dari barat, saya yakin anda tidak akan percaya. Mengapa? Karena itu melanggar semua asumsi yang anda yakini tentang bumi, evolusi, dan rotasinya.

Artikel ini mengambil dua pemikiran berbasis kearifan lokal yaitu Pemikiran Raja Udayana (PRU) dan Tri Hita Karana (THK) sebagai contoh bagaimana hal yang sama dapat diturunkan secara berbeda pada posisi metodologis karena keyakinan akan "kebenaran". Idealnya, saat kita berbicara tentang penggunaan PRU dan THK, kita harus yakin bahwa mereka adalah pengejawantahan dari apa yang diyakini; nilai fundamental kebenaran. PRU dan THK harus diletakkan bukan sekadar alat riset yang *fashionable*, namun cara untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan (epistemologi). Untuk itu, kita harus memahami terlebih dahulu PRU dan THK, sebelum kita menentukan bahwa mereka sesuai dengan keyakinan kita tentang apa yang "benar", *hence* dapat kita gunakan sebagai metodologi atau kerangka riset akuntansi. Walau demikian, dengan pemahaman akan keyakinan yang berbeda, PRU dan THK dapat menjadi sekadar tambahan variabel yang dapat diuji kebenarannya. Dua keyakinan ini da-

² Ontologi berkaitan dengan "...objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan?" (Suriastmantri, 1985:34). Secara ringkas, ontologi adalah pemahaman tentang keberadaan (*theory of being*).

³ Sepanjang pengalaman saya menjadi pembimbing S1, S2, S3 banyak yang bertanya manakah yang lebih lama penyelesaiannya: pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Mereka lebih senang memilih kuantitatif, misalnya, karena dianggap lebih cepat selesai. Inilah yang dimaksud dengan memilih metode penelitian berbasis pragmatisme.

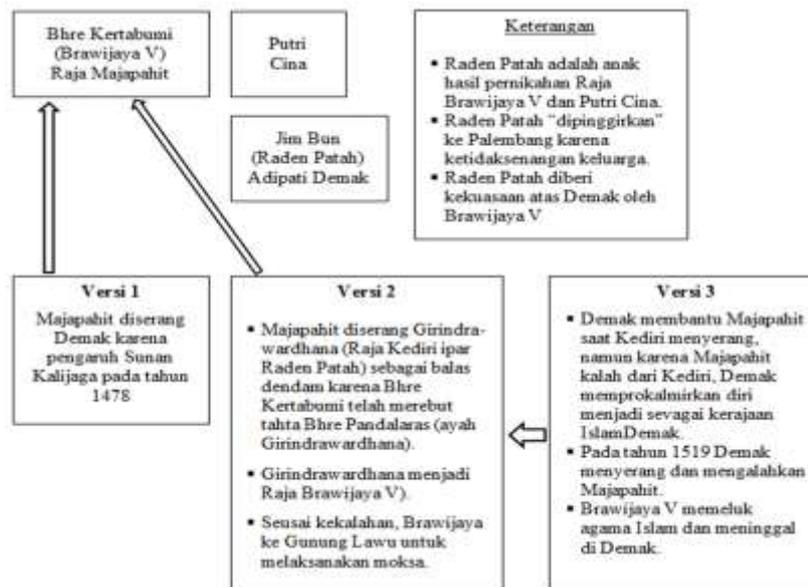
pat dibedakan dalam paradigma kritis dan positif.

2. Kajian Teori

Bali merupakan pusat pariwisata Indonesia karena kekhasan budaya serta agamanya. Hal inilah yang akan diangkat: bagaimana budaya dan Hindu dapat berkelindan dan memiliki eksistensi hingga kini? Apa peran raja Udayana dalam meletakkan Hindu sebagai basis budaya Bali? Sungguh menarik saat kita mencermati bagaimana Hindu di Bali dapat tetap hidup

(Gambar 1). Keruntuhan kerajaan besar ini terjadi secara fenomenal sehingga disebut sebagai suatu revolusi politik di Nusantara (Atmadja 2010:12) akibat konflik agama, ras, dan kekuasaan. Bahkan Bali menjadi suaka pengungsi pemeluk agama Hindu Majapahit, jauh setelah era Udayana⁶.

Kondisi kebertahanan Hindu sebagai agama budaya di Bali ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari suatu rangkaian perjalanan historis kerajaan-kerajaan Hindu-Islam di Bali. Iryanti (2000) membagi



Sumber: Disarikan dari Atmadja (2010:10-23)

Gambar 1. Genealogi: Runtuhnya Majapahit sebagai Kerajaan Hindu-Budha Terbesar Jawa

hingga sekarang menghadapi kolonialisasi Belanda dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu terbesar di Jawa⁴ runtuh karena Islam (Atmadja, 2010)⁵ dan perang sau-

masa historis di Bali menjadi lima periode (Gambar 2). Dalam masanya yaitu pada periode Jawa-Hindu, Udayana berhasil meletakkan nilai-nilai Hindu ke dalam kehidupan keagamaan, bermasyarakat dan pemerintahan Bali.

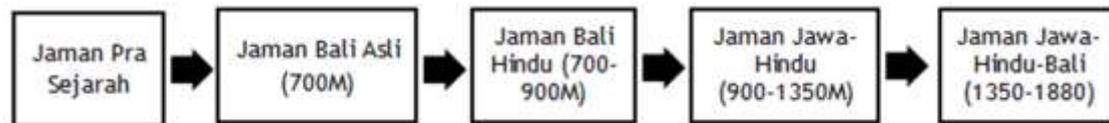
Udayana melaksanakan beberapa strategi politik yang mampu menguatkan dan menjaga nilai-nilai Hindu dalam budaya Bali. Strategi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi di awal masa pemerintahannya. Pada saat itu, kondisi keamanan di Bali cukup genting karena pendatang membuat kekacauan dan keresahan di desa Bantiran (Palguna,

⁴Hal ini sempat menjadi perdebatan. Temuan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta yang diterbitkan dalam buku "Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah yang Tersembunyi", tahun 2010, memberikan fakta bahwa Kerajaan Majapahit sebenarnya adalah kerajaan Islam.

⁵"Kebenaran" sejarah sangat tergantung kepentingan penyebar sejarah. G30S PKI yang sudah diragukan "kebenarannya", misalnya, kini sudah tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah. Demikian pula sejarah Bali, Hindu, Islam, dan Jawa. Saya berkeyakinan bahwa keruntuhan Majapahit bukan karena Islam, namun karena perang antar keluarga kerajaan yang memperebutkan kekuasaan. Temuan koin mas berlafazkan *laa illa ha illallah* (tiada Tuhan selain Allah)

mengindikasikan penerimaan Islam sebagai agama yang ditoleransi di masa Majapahit (jika tidak mau menyebutkan Majapahit sebagai kerajaan Islam).

⁶Misalnya Pangeran Wilis dan Pangeran Sepuh dari Blambangan yang lari ke Bali untuk mempertahankan Hindu sebagai kepercayaan mereka. (<http://www.balipost.co.id/>)



Sumber: Diabstraksi dari Iryanti (2000)

Gambar 2. Periode Kesejarahan Bali

2013) belum lagi dengan adanya perselisihan 9 sekte (Atmadja, 2010). Inilah yang kita akan pelajari sebagai bahan untuk membuat metodologi riset akuntansi kritis, atau menjelaskan dan memprediksi realita pada riset akuntansi positif.

Pertama, Udayana menggunakan strategi ‘perluasan’ daerah kekuasaan hingga ke Jawa melalui pernikahannya dengan Gunapriya Dharmapatni. Begitu tepat strategi politik ini, sehingga masa pemerintahan Udayana diakui sebagai satu periode sejarah Bali (Jaman Jawa-Hindu 900-1350M). Gunapriya Dharmapatni ini bukan sembarang wanita. Ia adalah cicit Mpu Sendok, seorang Raja Medang, yang kemudian dikenal sebagai Mahendradata. Tidak hanya itu, Dharmapatni dikenal masyhur dan bijak sehingga semakin menambah kegemilangan pemerintahan Udayana. Pernikahan ini menyebabkan hubungan yang amat baik antara Kerajaan Bali dan Mataram Kuno, hingga kelak salah putra hasil pernikahan Raja Udayana dan Dharmapatni, yaitu Airlangga (1019-1042), menjadi raja Medang. Pernikahan ini adalah pernikahan ‘politik’ yang dilangsungkan untuk menyatukan Jawa-Bali (Rahadi, 2013).

Kedua, usaha Udayana untuk mempertahankan aspek religius Bali tampak pada penetapan berbagai prasasti untuk menjaga keharmonisan agama Siwa-Hindu-Budha. Sejarah menunjukkan bahwa pada saat Airlangga berusia 11 tahun, dikeluarkanlah prasasti Batur Pura Abang A 933 S tentang golongan yang bertugas mengurus kehidupan keagamaan (Rahadi, 2013). Begitu pedulinya Udayana atas harmoni warganya, beliau mengundang Mpu Kuturan (seorang yang dianggap sebagai tokoh panutan budaya) untuk membantu menyatukan 9 sekte yaitu Pasupata, Linggayat, Bhagawata, Waisnawa, Indra, Saura, Brahma, Saiwa, dan Bhairawa yang selalu berselisih.

Mengapa Mpu Kuturan? Saya bersintesis bahwa Udayana memahami posisinya yang akan sulit dianggap netral di tengah kancah perselisihan, dan oleh karena itu mengutus Mpu Kuturan dari Jawa. Pemikiran strategis Raja Udayana melalui pelibatan Mpu Kuturan berhasil menyatukan perbedaan melalui sebuah ikrar *Tri Murti* di Pura Samuan Tiga, di mana berlangsung suatu *Pesamuan Agung*.

Kemudian, Mpu Kuturan meletakkan *Tri Murti*

sebagai fondasi yang kemudian mengejawantahkan konsep *Tri Hita Karana* dan *Tri Kaya Parisudha*. *Tri Murti* mengakui bahwa Ida Sang Hyang Widhi bermanifestasi dalam Brahma, Siwa, dan Wisnu⁷. Sejalan dengan itu, konsep THK menjelaskan “tiga penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan lingkungannya dan antara manusia dengan manusia” (Oka, 2004:61). Dwija (tanpa tahun) dalam Nabe (2015) menjelaskan keterkaitan *Tri Murti* dan THK:

“*Tri Hita Karana* dengan *Tri Murti* sebagai Keyakinan utama (sradha) dalam wujud pemujaan Siwa di Pura Dalem untuk implementasi parahyangan. Pura Desa selain sebagai stana Brahma juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan tata kemasyarakatan (pawongan). Pura Segara atau Pura Puseh selain sebagai stana Wisnu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan alam (palemahan).”



Sumber: [https:// phartyca.wordpress.com](https://phartyca.wordpress.com)

Gambar 3. Tri Murti

⁷ Brahma-dewa pencipta, Siwa-dewa pelebur, dan Wisnu-dewa pemelihara.

Ketiga, Udayana menjalankan pemerintahan dengan prinsip keadilan melalui struktur kepemilikan dan perpajakan yang memiliki konsekuensi pada ketahanan, keamanan, dan kesatuan kerajaan. Dalam kaitannya dengan struktur kepemilikan, Hendritianingih et al., (2008) menjelaskan bagaimana pada masa pemerintahan Udayana, paham *Tri Murti* dijadikan dasar keagamaan. Paham tersebut lalu diturunkan menjadi keputusan-keputusan di antaranya: setiap Desa Adat harus mendirikan Kahyangan Tiga⁸ sebagai penerapan dari paham *Tri Murti*; tiap pekarangan rumah harus memiliki bangunan suci yang disebut Sanggah atau Merajan; serta semua tanah-tanah pekarangan dan tanah-tanah yang terletak di sekitar Desa Adat (termasuk tanah-tanah Kahyangan Tiga) adalah milik Desa Adat dan Kahyangan Tiga yang tidak boleh diperjualbelikan. Mengenai struktur kepemilikan tanah di Bali Kuno, Palguna (2013) menjelaskan bahwa prasasti Batur Pura Abang A (1011 Masehi) lempeng VIIa secara spesifik menunjukkan pemberian tanah dari Raja Udayana kepada rakyat desa Er Hawang untuk digunakan bercocok tanam dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Terkait masalah perpajakan, Udayana dikenal arif dan adil. Budiasih (2015:416) menjelaskan bahwa pada prasasti Tamblingan yang dikeluarkan oleh Raja Udayana, terdapat tiga jenis pajak (*papilih* emas yaitu pajak dalam bentuk emas pilihan, *pabhumi* yaitu pajak bumi, dan *pawsi*) yang tidak dikenakan pada penduduk desa Tamblingan karena mereka bertugas "... memperbaiki dan memelihara benteng di Manasa sampai dengan pintu gerbangnya di Puncagiri." Bukti keadilan perpajakan pada masa Udayana juga dijelaskan oleh Palguna (2013:5):

"Raja Udayana juga memberi kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan tertentu terhadap kekayaan alam dan masyarakat saat itu, untuk mempertahankan keberadaan kekayaan alam tersebut. Penduduk saat itu juga mengalami perubahan jumlah, yang dikutip dalam prasasti Batur Pura Abang, untuk mengatasi berkurangnya penduduk tersebut Raja Udayana telah menetapkan pajak secara adil, yaitu pengurangan jumlah pajak dan aturan bagi penduduk yang mengawinkan kuda tidak dikenai pajak atau pembayaran jasa pengawinan kuda kepada orang dan pejabat yang melaksanakan. De-

ngan demikian penduduk setempat tidak lagi mengalami kemiskinan karena pembayaran pajak".

3. Metode Penelitian

Positivisme adalah paradigma yang memandang bahwa realita objektif dan terdiri dari elemen yang mempengaruhi satu ke lainnya. Pemahaman tersebut menurut Chua (1986) mengarahkan peneliti dalam mencari pengetahuan/kebenaran melalui epistemologi *hypothetico-deductive*. Suatu penelitian harus dimulai dari pragmatisme empiris (apa yang ada dan teruji). Oleh sebab itu, *grand theory* menjadi sangat penting. Ciri-ciri positivisme yang berkembang dari *logical empiricism*, terpaku pada kebenaran berbasis observasi, istilah matematis, dan istilah logis. Inilah yang sebenarnya menjustifikasi bahwa suatu penelitian haruslah parsimoni, dapat digeneralisir, bersifat replikatif, dan dapat dikuantifikasi. Karakter positivisme dari sudut pandang Popperian adalah sebagai berikut (Kamayanti, 2014):1

"Metode Falsifikasi memulai investigasi dengan masalah, dan kita mengambil masalah yang kita perkirakan dapat kita pecahkan secara rasional. (Jadi tidak mengambil masalah yang kira-kira tidak akan dapat dipecahkan).

Selanjutnya, secara rasional kita harus menyediakan serangkaian solusi yang akan diuji kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Solusi yang direncanakan ini berupa hipotesis, yang akan melalui *critical test* untuk melihat apakah solusi ini dapat memecahkan masalah (*hence = new theory*) ...Menurut Popper, sains harus dikembangkan dengan sangat berhati-hati... Tidak seperti para induksionis, maka ilmuwan belajar dari kesalahan mereka (memfalsifikasi teori), dan ini dilakukan secara *trial and error*. Sebuah teori hanya dianggap benar apabila ia telah menjalani serangkaian tes kritis dan dinyatakan telah dikonfirmasi kebenarannya (*confirmed/corroborated*)."

Oleh karena itu, saat seorang peneliti meyakini dengan keyakinan bulat bahwa ontologi atau keberadaan realita adalah sedemikian objektif, ia akan memandang baik PRU maupun THK sebagai penjelas elemen realita yang mekanistik. Pandangan ini mengacu bahwa realita yang harus patuh pada hukum sebab-akibat untuk memungkinkan prediksi. Pemi-

⁸ Tiga pura untuk memuja *Tri Murti*.

ikiran Udayana dan THK akan dianggap sebagai sebuah *grand theory* yang kemudian diturunkan sebagai variabel.

Saya belum berhasil mendapatkan penelitian positif yang menggunakan pemikiran Udayana, namun ini bukan berarti bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan. Misalnya, seorang peneliti dalam memahami keteraturan sosial berbasis pemikiran Udayana akan mengambil variabel strategi politik (metafora pernikahan Udayana dan Dharmapatni), dan variabel sistem perpajakan untuk melihat pengaruhnya dalam kesuksesan penerapan IFRS di suatu Negara.

Penelitian akuntansi yang menggunakan THK lebih banyak ditemui (lihat www.jamal.ub.ac.id). Saputra (2012), misalnya, menggunakan THK sebagai variabel moderasi dalam penelitian positifnya. Ia memandang bahwa "THK adalah sebuah filosofi yang sekaligus menjadi konsep kehidupan dan sistem kebudayaan masyarakat Bali", dan oleh karena itu ia gunakan sebagai elemen penjelas hubungan kausalitas dalam realita. Penelitian *positivism* lain yang menggunakan THK dilakukan oleh (Suardikha, 2010). Ia melihat bahwa THK adalah variabel-variabel yang bisa menjelaskan realita namun perlu diuji lebih lanjut.

Dengan menggunakan THK, walaupun hubungan antara Tuhan dan manusia (*parahyangan*) didiskusikan, dalam penelitian akuntansi, tidak berarti penelitian tersebut otomatis menjadi berparadigma spiritual/religius. Mengapa demikian?

Jawabannya sederhana. Tuhan yang hadir dalam THK (dalam riset akuntansi positif) bukan menjadi basis pencarian kebenaran. Kebenaran bagi positivisme bersifat empiris dan pragmatis. Tuhan menjadi elemen yang harus diuji terlebih dahulu/harus melalui proses falsifikasi. Kebenaran akan terungkap apakah Tuhan memiliki andil dalam pembentukan realita atau tidak. Koridor kebenaran tetap terletak pada hasil empiris. Jika kebenaran empiris yang diperoleh tidak sesuai dengan wahyu Tuhan, maka wahyu Tuhanlah yang salah⁹. Rasionalitas akal harus selalu berada di atas kepercayaan akan Tuhan (yang tidak rasional karena Tuhan tidak dapat diindera). Bukankah kemudian menggelikan bahwa seseorang bisa meyakini Tuhan dalam kehidupan beragamanya, namun saat mencari kebenaran dari riset, ia mereduksi Tuhan sebagai sesuatu yang masih perlu difalsifikasi?

⁹ *Naudzubillahi mindzalik* (artinya: kami berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Doa ini adalah doa umat Islam saat mendengar hal-hal mengerikan).

4. Hasil dan Pembahasan

Jika para positivis meyakini realita yang objektif, maka paradigma akuntansi kritis meyakini bahwa realita saat ini adalah bentukan operasi ideologi oleh kaum yang berkuasa atas kaum yang berada pada kesadaran semu (*false consciousness*) (Chua, 1986). Sebenarnya, menurut saya, ada satu benang merah antara pemikiran Udayana dan keyakinan atas realitas semacam ini. Paradigma kritis, yang dibawa oleh Frankfurt School, bertujuan melakukan emansipasi dan perubahan; sedangkan Udayana melakukan hal serupa. Artinya, jika dalam paradigma positivisme, pemikiran Udayana dijadikan *grand theory* untuk menemukan elemen mekanistik realitas, maka pada paradigma kritis, pemikiran Udayana dijadikan metode pembebas/mengubah realitas menjadi realitas yang bebas penjajahan.

THK pun akan dilihat sebagai suatu cara untuk membebaskan akuntansi. Konsep *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, adalah konsep yang mampu menggantikan akuntansi materialistik¹⁰ yang disebabkan oleh akuntan oportunistis.

Sebagaimana pada paradigma positivisme, saya belum berhasil pula menemukan riset akuntansi kritis berbasis pemikiran Udayana. Walaupun demikian, seorang peneliti dapat saja menggunakan strategi yang diambil Udayana untuk mengembalikan agama sebagai basis kehidupan sehari-hari sebagai tahapan riset akuntansi kritis. Akuntansi sektor publik Indonesia yang sedang merangkul konsep *New Public Management* (NPM) dan aktualisasi dapat dipandang sebagai proses masuk ke dalam jebakan neoliberalisme. Strategi integrasi budaya-agama yang dilakukan Udayana kemudian dibawa pada ranah penelitian kritis. Hal seperti ini sangat dimungkinkan.

Penggunaan THK pada paradigma non-positif lebih mudah untuk ditemukan. Wirajaya et al. (2014), misalnya, meneliti tentang akuntabilitas berbasis THK walaupun ini berparadigma interpretif dengan menggunakan etnografi. Penelitian yang lebih kritis dilakukan oleh Sudana (2014) saat mengonstruksi kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Bali menggunakan THK melalui Teori Komunikasi Aksi Habermas.

5. Simpulan

Menggunakan metodologi tertentu jika diguna-

¹⁰ Beberapa pemikiran kritis menganggap bahwa akuntansi moderen telah terjebak dalam jaring materialistik karena berorientasi pada laba sebagai *bottom line* (Triyuwono 2010)

kan tanpa memahami, atau lebih parahnya, mengabaikan keyakinan diri atas realita sama seperti memasak tanpa cinta. Metodologi hanya akan direduksi menjadi alat.

Dalam rangka menghasilkan pengetahuan yang diyakini “benar”, peneliti akuntansi harus mampu menghubungkan pemahaman ontologis realita dengan epistemologinya. Pemikiran Raja Udayana dan THK setelah dijelaskan melalui genealogi, menghasilkan pemahaman tentang realita Bali pada saat itu. Pemahaman ini dapat diletakkan sebagai bentuk elemen-elemen mekanistik realita (riset akuntansi positif), dan atau dijadikan metode pembebas dari realita yang terhegemoni kepentingan.

Khusus dalam hal studi kesejarahan (mengungkap pemikiran lampau), setiap peneliti perlu menyadari bahwa kebenaran sejarah selalu mengikuti kepentingan penyebar sejarah. Oleh karena itu, peneliti harus lebih memiliki usaha untuk melakukan triangulasi sumber sebelum memposisikan diri di “kebenaran” tertentu.

Siapa pun yang menjadi peneliti harus menemukan terlebih dahulu keyakinannya, agar penelitian tidak sekadar “jadi” untuk memenuhi kredit kepangkatan atau syarat kelulusan suatu jenjang pendidikan. Penelitian seyogyanya adalah sumbangsih tertinggi akademisi sebagai perwujudan tanggungjawabnya kepada Tuhan untuk membentuk peradaban ideal.

Daftar Rujukan

- Atmadja, N.B. (2010). *Genealogi Keruntuhan Majapahit: Islamisasi, Toleransi, dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Budiasih, I. G. A. N. (2015). Fenomena Akuntabilitas Perpajakan pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 5, No. 3, pp. 409-420.
- Chua, W. F. (1986). Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*, Vol. 61, No. 4, pp. 601-632.
- Comte, A. (1896). *The Positive Philosophy*. London: George Bells and Sons.
- De Loo, I., and A. Lowe. (2011). Mixed Methods Research: Don't - “Just do it.” *Qualitative Research in Accounting & Management*, Vol. 8, No. 1, pp. 22-38. doi:10.1108/117660911111-24685.
- Hendritaningih, S., A. Budiarta, dan A. Hernandi.. (2008). Masyarakat dan Tanah Adat di Bali: Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Bali. *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 15, No. 7, hlm. 517-528.
- Icerman, R. C., and J. K. Welch. (1989). Data Source and Measurement Differences in Municipal Accounting Measures. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 8, No. 2, pp. 143-160.. doi:10.1016 /0278-4254(89)90020-3.
- Iryanti, V. E. (2000). Tari Bali: Sebuah Telaah Historis. *Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, Vol. 1, No. 2, hlm. 75-90.
- Jackling, B., B. J. Cooper, P. Leung, and S. Dellaportas. (2007). Professional Accounting Bodies' Perceptions of Ethical Issues, Causes of Ethical Failure and Ethics Education. *Management Accounting Research*, Vol. 22, No. 9, hlm. 928-944. doi:10. 1017/S09592709100004 20.
- Kamayanti, A. (2014). Asal Filosofi Sains Moderen: The Popperian School (anti Tuhan?). Diakses dari arikaamayanti.lecture.ub.ac.id.
- Modell, S. (2005). Triangulation Between Case Study and Survey Methods in Management Accounting Research: an Assessment of Validity Implication. *Management Accounting Research*, Vol. 16, No. 2, pp. 231-254.
- Nabe, Ida Pandita. Nda. (2015). Tri Hita Karana, Relevansinya Antisipasi Perubahan Iklim Dunia . Diakses dari http://www.balipost.co.id/balipost_cetaK/2007/10/31/op2.htm
- Oka, I. G. B. (2004). Kosep Penataan Kawasan Suci Margi Agung Pura Besakih. *Jurnal Pemukiman Natak*, Vol. 2, No. 2, hlm. 56-66.
- Palguna, I. K. E. (2013). Aspek-Aspek Ketahanan pada Masa Pemerintahan Raja Udayana di Bali. *Jurnal Arkeologi*, hlm. 1-8.
- Popa, M. (2012). Optimization of Fiscal Costs Versus Creative Accounting. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol. 62, pp. 1271-1275. doi:10.10 16/j.sbspro.2012.09.217.
- Rahadi, D. G. B. (2013). Konsistensi Raja Airlangga dalam Menjalankan Dharma di Jawa Timur Abad X-XI M. *Avatara - eJournal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1, hlm. 34-43.
- Saputra, K. A. K. (2012). Pengaruh *Locus of Control* terhadap Kinerja Internal Auditor dengan Kultur Lokal Tri Hita Karana sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 3, No. 1, hlm. 86-100.
- Shah, S. Z. A and S. Butt. (2011). Creative Accounting: A Tool to Help Companies in a Crisis or a Practice to Land Them into Crises. Internatio-

- nal Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) Vol. 16, pp. 96-102.
- Suardikha, I. M. S. (2010). *Pengaruh Budaya Tri Hita Karana (THK) terhadap Kesuksesan Penggunaan Sistem informasi Akuntansi (SIA): Studi pada BPR di Provinsi Bali*. Retrieved from <http://physics.studentjournal.ub.ac.id/index.php/psj/article/view/148>.
- Sujana, I. K. (2014). Rekonstruksi Penilaian Kinerja Lembaga Perkreditan Desa: Integrasi Teori Komunikasi Aksi Habermas dan Budaya Tri Hita Karana. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Universitas Udayana*.
- Triyuwono, I. (2010). Mata Ketiga: *Se Laen Sang* Pembebas Sistem Pendidikan Tinggi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1-23.
- Wirajaya, G. A., Sudarma, M., Ludigdo, U., and Djahhuri, A. (2014). The Accountability in the Dimension of Tri Hita Karana (THK). *Scientific Research Journal*, Vol. II, No. VIII, pp. 10-17.